



# **Pengaruh Konflik Klaim Teritorial Pulau Dokdo/Takeshima Dalam Hubungan Diplomasi Bilateral Republik Korea-Jepang (2017-2021)**

Devin Alif Putra Pratama

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Indonesia;  
email: devin18001@mail.unpad.ac.id

Teuku Rezasyah

Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Indonesia;  
email: teuku.rezasyah@unpad.ac.id

| Submit: 21-09-2022

| Accept: 27-01-2023

| Publish: 31-01-2023 |

## **Keywords**

*Bilateral diplomacy; Dokdo/Takeshima Island; Japan; territorial claim; The Republic of Korea*

## **ABSTRACT**

*One form of dispute caused by disagreements during the World War II era was the conflict over the claims of the Republic of Korea and Japan over the islands of Dokdo/Takeshima. This article was made with the aim of explaining how the conflict between the two countries over the Dokdo/Takeshima islands directly affected bilateral diplomatic relations between the two countries from 2017 to 2021. In this article, qualitative case study research methods were used and described descriptively. By analyzing the 5 indicators of bilateral diplomacy from Pannier (2020), the authors found that during 2017-2021 there was an increase in intensity in the bilateral diplomatic relations of the Republic of Korea and Japan. Although this may indicate that this conflict doesn't have any effect on the bilateral diplomatic relations of the Republic of Korea, here the researchers find a small-scale influence in 2017 to 2020, as well as a large-scale influence in 2021 related to the intensity of the high-representation meeting of the Republic of Korea and Japan.*

## **Kata Kunci**

diplomasi bilateral; Jepang; klaim territorial; pulau Dokdo/Takeshima; Republik Korea

## **ABSTRAK**

Salah satu bentuk pertikaian yang disebabkan oleh ketidak-sepahaman sejarah era Perang Dunia 2 adalah konflik atas klaim Republik Korea dan Jepang terhadap kedaulatan wilayah atas pulau Dokdo/Takeshima. Penelitian ini kemudian dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana konflik kedua negara atas kepemilikan pulau Dokdo/Takeshima berpengaruh secara langsung terhadap hubungan diplomatik bilateral kedua negara dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Dalam artikel ini, digunakan metode kualitatif dengan studi kasus dan dijelaskan secara deskriptif. Dengan melakukan analisis terhadap 5 indikator diplomasi bilateral dari Pannier (2020) peneliti menemukan bahwa selama tahun 2017-2021 terjadi sebuah peningkatan intensitas dalam hubungan diplomasi bilateral Republik Korea dan Jepang. Meskipun hal ini dapat mengindikasikan bahwa konflik ini tidak memberikan pengaruh apapun ke dalam hubungan diplomasi bilateral Republik Korea, di sini peneliti menemukan adanya pengaruh berskala kecil di tahun 2017 hingga 2020, serta pengaruh berskala besar di tahun 2021 yang berkaitan dengan intensitas pertemuan perwakilan tinggi Republik Korea dan Jepang.

## **PENDAHULUAN**

Sengketa teritorial dapat dikatakan sebagai salah satu konflik yang paling kompleks dalam ranah studi Hubungan Internasional. Seluruh negara yang ada baik di saat ini maupun di masa lampau akan sekuat tenaga melindungi kedaulatan, baik kedaulatan teritorial maupun kedaulatan negara mereka sebagai bentuk mereka dalam melindungi bangsa dan *national interest* mereka. Hal yang sama, juga diupayakan oleh Republik Korea dan Jepang yang memperebutkan klaim kedua negara tersebut terhadap pulau Dokdo (berdasarkan Republik Korea) atau Takeshima (nama yang disematkan oleh Jepang).

Pasca Perang Dunia II berakhir dengan kekalahan Jepang di perang Pasifik, nasib kedaulatan teritorial baik untuk Republik Korea dan Jepang, berada di tangan Amerika Serikat sebagai pemenang perang Pasifik. Dengan berhentinya penjajahan Jepang di Korea pun, Jepang tentunya secara resmi menyerahkan seluruh wilayah Korea ke pemerintahan resmi Korea. Termasuk pulau Dokdo/Takeshima, Amerika Serikat sebagai aktor penengah antara Korea dan Jepang memutuskan untuk mendefinisikan pulau Dokdo/Takeshima berada di bawah jangkauan politik dari Korea; dalam artian lain pulau Dokdo/Takeshima diakui sebagai bagian dari Korea (Ismail, 2017, hal. 83). Proses pengakuan ini dilakukan secara terpisah, melalui pernyataan Amerika Serikat dalam *Supreme Commander for the Allied Powers Instruction Notice* (SCAPIN) No. 677 dan No.1033 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Amerika Serikat di Pasifik pada tahun 1946. Diakuinya pulau Dokdo/Takeshima sebagai bagian dari Korea (Republik Korea) oleh Amerika Serikat ini juga dilakukan berdasarkan Deklarasi Kairo 1943 dan Deklarasi Postdam 1945 (Kim, 2009, hal. 97).

Meskipun dari sini sudah terlihat bagaimana pulau Dokdo secara hukum menjadi bagian dari Korea pada saat itu, ketakutan Amerika Serikat akan kemungkinan Republik Korea yang memiliki haluan liberalis akan diambil alih oleh

Republik Rakyat Demokratik Korea yang berhaluan komunis, memutuskan untuk menimpa SCAPIN dengan Perjanjian Damai San Francisco 1951, yang di mana dalam perjanjian ini tidak dijelaskan secara spesifik apakah Dokdo merupakan wilayah dari Republik Korea atau Jepang (Wiegand, 2015). Dengan adanya perubahan ini, memunculkan adanya perubahan sikap Jepang terhadap kedaulatan wilayah pulau Dokdo/Takeshima yang memutuskan untuk mengakui pulau Dokdo/Takeshima sebagai wilayah teritorial Jepang; yang di mana hal ini sangat berbeda dengan keputusan Amerika Serikat sebelumnya. Alasan pemerintahan Jepang memutuskan untuk mengakui kedaulatan pulau Dokdo/Takeshima atas dirinya ini berasal dari keputusan Amerika Serikat berdasarkan Perjanjian Damai San Francisco 1951, yang dalam perjanjian ini tidak dijelaskan secara spesifik apakah Dokdo/Takeshima merupakan wilayah dari Republik Korea atau Jepang (Wiegand, 2015, hal. 350). Dari ketidakjelasan status pulau Dokdo pada perjanjian tersebut meningkatkan harapan Jepang dalam kembali mencoba untuk mengakui pulau Dokdo sebagai pulau Takeshima kepemilikan Jepang, mengakibatkan Republik Korea maupun Jepang terlibat konflik dalam memperebutkan hak kedaulatan teritorial pulau Dokdo.

Ketertarikan penulis adalah untuk membahas lebih lanjut bagaimana pengaruh konflik pulau Dodo/Takeshima ini terhadap diplomasi bilateral Republik Korea dan Jepang.

## **KERANGKA KONSEPTUAL**

Kedaulatan teritorial merupakan sebuah konsep yang esensial bagi negara, mengingat kedaulatan teritorial sendiri merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh sebuah negara dalam menjalankan kewajiban bernegara mereka—seperti melindungi warga negara serta wilayah yang berada dalam bagian kedaulatan tersebut dari aktor asing, hingga dapat menjadi basis sebuah negara dalam melakukan klaim terhadap sebuah wilayah di teritorial asing (Malanczuk, 1997).

Dalam kasus konflik klaim teritorial pulau Dokdo/Takeshima yang melibatkan Republik Korea dan Jepang, bagaimana kedua aktor negara tersebut memainkan kartu kedaulatan teritorial mereka sangat penting di sini; di mana dalam satu sisi jika Republik Korea dapat mengaplikasikan hak kedaulatan teritorial mereka dengan baik maka pulau Dokdo tidak akan direbut Jepang—sementara apabila Jepang mengaplikasikan hak kedaulatan territorial mereka dengan baik maka mereka dapat melakukan klaim wilayah terhadap pulau Takeshima. Dalam menengahi konflik ini, kedua negara pada akhirnya melakukan aktivitas diplomasi bilateral untuk menyuarakan hak kedaulatan mereka kepada masing-masing aktor yang terlibat.

Jika praktik diplomasi merupakan sebuah cara yang diciptakan untuk memperbaiki hubungan yang melibatkan negara berdaulat, maka diplomasi bilateral menentukan kapan, di mana, dan bagaimana sebuah hubungan spesifik sebuah negara ke negara lain dapat lebih relevan; sehingga dapat dikatakan bahwa diplomasi bilateral merupakan sebuah praktik dasar yang dapat dilakukan sebuah negara untuk membangun hubungan dengan negara lain (Rozental & Buenrostro, 2013). Untuk mendefinisikan terkait bentuk diplomasi bilateral yang sebenarnya, Pannier (2020, hal. 21-27) menyebutkan setidaknya ada 5 jenis aktivitas yang dilakukan oleh 2 negara untuk dikategorisasikan sebagai sebuah praktik diplomasi bilateral, yakni: (1) perjanjian formal antar negara, (2) hubungan antar kepala kenegaraan dan pemerintahan, (3) pertukaran kedutaan besar, (4) sektor swasta (*private stakeholder*), (5) serta pertukaran masyarakat kedua negara. 5 jenis aktivitas ini juga yang kemudian akan dipakai sebagai sebuah indikator untuk melihat aktivitas diplomasi bilateral antara Republik Korea dan Jepang semenjak konflik klaim teritorial dalam memperebutkan kedaulatan wilayah mereka atas pulau Dokdo/Takeshima kembali mencuat selama 6 tahun terakhir.

## **METODE RISET**

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan eksplanatif (Creswell, 2014). Di mana peneliti akan secara kronologis mendeskripsikan hubungan diplomasi bilateral Republik Korea dan Jepang dan menjelaskan efek konflik pulau Dokdo/Takeshima terhadap hubungan diplomasi antara kedua negara tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Hubungan Diplomasi Bilateral Republik Korea dan Jepang**

Dalam menguraikan perkembangan hubungan diplomasi bilateral Republik Korea dan Jepang dari tahun 2017 hingga tahun 2021, peneliti akan merujuk kepada 5 indikator kegiatan diplomasi bilateral dari Pannier (2020), yakni: (1) perjanjian formal antar negara, (2) hubungan antar kepala kenegaraan dan pemerintahan, (3) pertukaran kedutaan besar, (4) sektor swasta (*private stakeholder*), (5) serta pertukaran masyarakat kedua negara. Ke-5 indikator ini kemudian akan digunakan sebagai alat bantu peneliti untuk mengukur intensitas kegiatan diplomasi antara Republik Korea dan Jepang.

Bagi Republik Korea dan Jepang, membentuk hubungan diplomatis yang baik di antara dua negara merupakan salah satu fokus utama dalam pengaplikasian kebijakan luar negeri kedua negara. Dalam laporan *Diplomatic White Paper* dari Republik Korea serta *Diplomatic Blue Book* dari Jepang, disebutkan bahwa meningkatkan relasi kedua negara tersebut dengan negara tetangga, Republik Korea dan Jepang secara spesifik, memiliki tujuan yang sangat penting bagi Republik Korea dan Jepang. Dilihat dari *Diplomatic White Paper 2018*, yang berisi tentang ringkasan kegiatan diplomasi dari Republik Korea di tahun 2017, dikatakan bahwa upaya Republik Korea dalam membentuk hubungan diplomatis yang lebih baik dengan Jepang dilakukan untuk memperbaiki hubungan diplomasi ulang-alik (*shuttle diplomacy*) antara kedua negara

tersebut; membentuk kerja sama yang lebih dalam terkait provokasi yang dilakukan oleh Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) melalui program senjata nuklir mereka; serta pertukaran nilai-nilai ekonomi, budaya, serta pertukaran masyarakat mereka melalui pertukaran pelajar kepemudaan (Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea, 2018, hal. 21)

Sementara bagi Jepang, membangun hubungan diplomatik yang baik dengan Republik Korea sendiri dilakukan karena hubungan diplomatik yang baik antara kedua negara tersebut merupakan suatu hal yang esensial dalam memastikan stabilitas dan perdamaian di wilayah Asia-Pasifik (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2018, hal. 11).

### **Hubungan Diplomasi Bilateral Republik Korea dan Jepang di Era Park Geun-hye—Moon Jae-in—Shinzo Abe**

Di tahun 2017, banyak kegiatan yang dilakukan baik dari Republik Korea maupun Jepang yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan intensitas hubungan diplomasi mereka yang bersifat bilateral di tingkat *high level*, beberapa di antaranya adalah komunikasi formal melalui jalur telepon antara perdana menteri Jepang dan presiden Republik Korea yang dilanjutkan dengan kunjungan presiden Republik Korea Moon Jae-in ke Jepang pada bulan Mei, lalu perjanjian kedua negara dalam restorasi *shuttle diplomacy* dalam percakapan puncak (*summit*) Republik Korea-Jepang pada *event G20 Summit* pada bulan Juli di Hamburg dan *Eastern Economic Forum* pada bulan September di Vladivostok. (Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea, 2018, hal. 60).

Selain ketiga pertemuan tingkat tinggi di atas, di tahun 2017 sendiri Republik Korea dan Jepang telah melakukan 4 pertemuan, baik itu berbentuk *summit* maupun pertemuan formal antara Menteri Luar Negeri dari kedua negara, yang diantaranya adalah: (1)

pertemuan Menteri Luar Negeri Republik Korea-Jepang di *event G20* pada bulan Februari di Bonn, (2) pertemuan Menteri Luar Negeri Republik Korea-Jepang dalam *ASEAN Foreign Ministers Meeting* pada bulan Agustus di Manila, (3) pertemuan Menteri Luar Negeri Republik Korea-Jepang dalam *72<sup>nd</sup> United Nations General Assembly* pada bulan Septermber di New York, dan (4) pertemuan Menteri Luar Negeri Republik Korea-Jepang ketika Menteri Luar Negeri Republik Korea mengunjungi Jepang pada bulan Desember. Diadakannya 7 pertemuan tingkat tinggi antara pemerintahan Republik Korea dan Jepang dapat dikatakan sebagai sebuah perkembangan apabila melihat pertemuan tingkat tinggi bilateral antara kedua negara pada tahun 2016, yang di mana pada tahun tersebut hanya terjadi 1 pertemuan bilateral pada pertemuan negara-negara G20 pada bulan September di Tiongkok dan 1 pertemuan multilateral antara Republik Korea-Jepang-Tiongkok pada bulan Agustus di Jepang (Fifield, 2016 ; VOA, 2016).

Selain mengadakan pertemuan tingkat tinggi melalui *summits* dan pertemuan Menteri Luar Negeri kedua negara, hubungan diplomatik bilateral baik antara Republik Korea dan Jepang ditunjukkan melalui pembentukan perjanjian, seperti yang ditunjukkan dengan serta perilisan kembali perjanjian antara Republik Korea dan Jepang terkait isu *comfort women*, yang sudah dijalankan sejak 2015 (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2018, hal. 25). Selain itu, pengadaan berbagai program pertukaran sumber daya manusia juga menjadi salah satu kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh baik Republik Korea maupun Jepang, di mana pada tahun 2017 terdapat 40 program pertukaran staf pemerintahan dan pelajar yang diadakan oleh Republik Korea dan Jepang, serta pertukaran staf parlemen kedua negara dalam *40<sup>th</sup> Joint Meeting of the Korea-Japan Parliament's Union* dan 4 kunjungan terpisah dari *Korea-Japan Parliament's Union* ke Jepang (Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea, 2018, hal. 60).

Di tahun 2018, terdapat setidaknya 4 kesempatan diplomasi bilateral antara Republik Korea dan Jepang yang mempertemukan pemimpin masing-masing negara (Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea, 2019). Komunikasi tingkat tinggi ini diawali dengan kunjungan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, ke Republik Korea pada bulan Februari sebagai rangkaian acara kunjungan beliau untuk menghadiri upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2018 yang diadakan di Pyongchang, Republik Korea (Padden, 2018). Pemimpin kedua negara ini kembali dipertemukan pada *ROK-Japan summit* ketika pertemuan trilateral antara Republik Korea-Jepang-Tiongkok diadakan pada bulan Mei di Tokyo, Jepang. Pada bulan September, terdapat dua pertemuan tingkat tinggi yang melibatkan Perdana Menteri Republik Korea Lee Nak-yon dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada pertemuan dalam kesempatan *Eastern Economic Forum* Vladivostok, Rusia; dan pertemuan presiden Republik Korea Moon Jae-in dengan Presiden Shinzo Abe pada *ROK-Japan Summit* saat penyelenggaraan *UN General Assembly*.

Baik dari Republik Korea dan Jepang juga mengadakan kunjungan Menteri Luar Negeri yang lebih banyak dari tahun sebelumnya, yang hal ini menunjukkan intensitas tinggi dari hubungan diplomasi bilateral Republik Korea-Jepang. Di tahun 2018, terdapat 8 kali pertemuan antara perwakilan dari Menteri Luar Negeri masing-masing negara, yakni (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2019, hal. 42): (1) pertemuan antara perwakilan Menteri Luar Negeri Republik Korea dan Jepang ketika Menteri Luar Negeri Republik Korea berkunjung ke Washington D.C., Amerika Serikat pada bulan Maret; (2) pertemuan perwakilan Menteri Luar Negeri Republik Korea dan Jepang ketika Menteri Luar Negeri Jepang berkunjung ke Seoul, Republik Korea pada bulan April; (3) pertemuan perwakilan Menteri Luar Negeri Republik Korea dan Jepang ketika Menteri Luar Negeri Republik Korea berkunjung ke Seoul, Republik Korea pada bulan Juni; (4) pertemuan Menteri Luar

Negeri Republik Korea dan Jepang pada pertemuan trilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Korea-Amerika Serikat-Jepang di Tokyo, Jepang pada bulan Juli; (5) pertemuan Menteri Luar Negeri Republik Korea dan Jepang di *ASEAN Regional Forum* (ARF) di Singapura pada bulan Agustus; (6) pada 11 September, terdapat pertemuan antara Menteri Luar Negeri kedua negara pada pertemuan *WEF on ASEAN* di Hanoi, Vietnam; (7) pada tanggal 26 September, Menteri Luar Negeri kedua negara kembali bertemu secara formal dalam *UN General Assembly* di New York, Amerika Serikat; dan (8) pertemuan Wakil Menteri Luar Negeri dalam rapat kementerian kedua negara yang berlokasi di Tokyo, Jepang pada bulan Oktober 2018 (Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea, 2019, hal. 75).

Pada tahun 2018, terjadi peningkatan dalam intensitas pertemuan dan pertukaran parlemen masing-masing negara di banding tahun sebelumnya, yang hanya terjadi 5 kali, menjadi 11 kali kunjungan (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2019, hal. 75-76). Kunjungan dari perwakilan anggota ini terdiri dari beberapa kunjungan dalam kesempatan-kesempatan berupa pembukaan Olimpiade Musim Dingin Pyonghang 2018, dialog antara perwakilan parlemen Republik Korea-Jepang di Republik Korea, kunjungan *Korea-Japan Parliament's Union* ke Jepang, Pertemuan Gabungan *Korea-Japan* dan *Japan-Korea Cooperation Committees*, serta Pertemuan Gabungan *Korean-Japan* dan *Japan-Korean Parliamentarians Unions*.

Pada tahun 2019, terjadi sebuah perubahan besar dalam hubungan diplomasi bilateral antara Republik Korea dan Jepang, di mana pada terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019 pemerintah Republik Korea menyatakan bahwa keputusan untuk memperpanjang perjanjian *General Security of Military Information* (GSOMIA) tidak lagi menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri Republik Korea, sehingga Republik Korea pada saat itu memutuskan untuk mengakhiri GSOMIA pada Agustus 23 (Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea, 2020). Keputusan besar ini

tentunya dapat mengancam hubungan diplomasi yang sudah terjalin baik antara Republik Korea dan Jepang. Hal ini dapat mengingat perjanjian yang dibentuk kedua negara tersebut pada tahun 2016 dengan tujuan untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi antara kedua negara di ranah keamanan dan berkontribusi kepada perdamaian dan stabilitas regional Asia-Pasifik (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2020, hal. 41).

Efek lain yang dapat disebabkan oleh pengakhiran GSOMIA secara sepah oleh Republik Korea ini adalah pemberhentian informasi terkait proyek nuklir Republik Demokratik Rakyat Korea, yang menjadi salah satu perhatian utama Jepang, ke Jepang (Stangarone, 2019). Pasalnya, kebanyakan informasi terkait Republik Demokratik Rakyat Korea yang diterima oleh Jepang secara langsung disampaikan oleh badan intelijen Republik Korea—and dengan pembagian informasi intelijen antara Republik Korea dan Jepang menjadi salah satu aspek dalam GSOMIA, maka setelah Republik Korea keluar dari perjanjian ini Jepang tidak akan bisa menerima informasi intelijen lagi dari Republik Korea. Namun dengan adanya tekanan dari Amerika Serikat bagi Republik Korea untuk membatalkan keputusan tersebut, akhirnya pada 22 November 2019 Republik Korea menarik kembali keputusan tersebut dan pembagian informasi intelijen antara Republik Korea dan Jepang masih berjalan hingga kini.

Selain perjanjian formal antara kedua negara, Republik Korea dan Jepang juga melakukan upaya untuk meningkatkan hubungan diplomatis bilateral mereka menjadi lebih baik dengan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan tingkat tinggi secara bilateral. Pertemuan pimpinan kedua negara pada tahun 2019 ini terjadi sebanyak 3 kali, yakni (Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea, 2020, hal. 67): (1) pertemuan Perdana Menteri Lee Nak-yon dan Perdana Menteri Shinzo Abe dalam upacara penurunan tahta Kaisar Naruhito pada Oktober 2019 di Tokyo, Jepang; (2) pertemuan di *Korea-Japan*

*Summit* dalam kesempatan ASEAN+3 *Summit* pada bulan November di Bangkok, Thailand; (3) pertemuan di *Korea-Japan Summit* dalam kesempatan pertemuan trilateral Republik Korea-Jepang-Tiongkok pada bulan Desember di Chengdu, Tiongkok.

Selain mengadakan pertemuan antara pemimpin negara masing-masing, pemerintah Republik Korea dan Jepang juga mengadakan pertemuan melalui perwakilan Menteri Luar Negeri mereka masing-masing, yang di mana pada tahun tersebut terjadi 10 kali pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Korea dan Jepang, baik itu dalam *event* pertemuan bilateral, trilateral, maupun multilateral.

Terkait dengan kunjungan serta pertukaran masyarakat baik dari Republik Korea maupun dari Jepang, setidaknya pada tahun 2019 sendiri terjadi sekitar 14 *event* pertukaran antara Republik Korea dan Jepang dalam rangka meningkatkan intensitas hubungan diplomatis yang baik antara Republik Korea dan Jepang (Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea, 2020, hal. 68). Beberapa dari acara kunjungan dan pertukaran tersebut antara lain Konferensi Bisnis Jepang-Korea pada bulan September, Pertemuan Gabungan *Korean-Japan* dan *Japan-Korean Parliamentarians Unions* pada bulan November, serta Program Pertukaran Jurnalis Korea-Jepang pada bulan Desember.

### **Hubungan Diplomasi Bilateral Republik Korea dan Jepang di Era Moon Jae-in—Yoshihide Suga—Fumio Kishida**

Layaknya di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2020, dalam hubungan diplomatis antara Republik dan Jepang, masing-masing dari Republik Korea dan Jepang mengaplikasikan pendekatan diplomasi jalur ganda (*multi-track diplomacy*) yang memisahkan isu-isu sejarah kedua negara yang menjadi salah satu ‘noda’ dalam peningkatan hubungan diplomasi bilateral antara Republik Korea dan Jepang, sehingga kerja sama antara kedua negara menjadi lebih *future-oriented*.

Meskipun pergerakan antara Republik Korea dan Jepang menjadi lebih sulit untuk dilakukan pada tahun 2020 dengan menyebarnya pandemi COVID-19, baik dari Republik Korea dan Jepang tetap melanjutkan hubungan diplomasi bilateral mereka baik dengan kunjungan fisik hingga kunjungan non fisik/*contactless*—seperti pengadaan konferensi melalui komunikasi telepon dan *video conferences*.

Dengan menggunakan mekanisme aktivitas diplomasi *contactless*, baik dari Republik Korea maupun Jepang telah berhasil dipertemukan dalam 2 kesempatan, yakni di level *summit* antara Presiden Republik Korea Moon Jae-in dan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga pada 24 September 2020 dan di level pertemuan *ministerial* antara Menteri Luar Negeri masing-masing negara pada 3 Juni 2020. Komunikasi telepon tingkat tinggi antara pemimpin Republik Korea dan Jepang ini diadakan dalam rangka perkenalan dari Republik Korea terhadap Yoshihide Suga, yang baru diangkat menjadi Perdana Menteri Jepang, menggantikan Shinzo Abe

Meskipun komunikasi telepon ini terdengar ringan, percakapan antara Presiden Republik Korea dan Perdana Menteri Jepang ini sendiri memiliki topik yang sangat esensial dalam hubungan diplomatis antara kedua negara, di mana masing-masing dari pemimpin negara tersebut mengharapkan adanya percepatan koordinasi dan usaha komunikasi antara kedua negara tersebut dengan harapan isu-isu yang dapat menunda percepatan perbaikan hubungan diplomatis kedua negara tersebut, seperti *comfort women* dan kerja paksa pada era kolonialisme Jepang di Korea, agar cepat terselesaikan (Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea, 2021, hal. 100; Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2021, hal. 46).

Selain 2 pertemuan tingkat tinggi tersebut, pada tahun 2020 sendiri Republik Korea dan Jepang telah mengadakan 3 komunikasi bilateral tingkat tinggi, yakni pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri Republik Korea dan Jepang dalam *meeting* Menteri Luar Negeri Korea-Amerika Serikat-Jepang pada bulan

Januari di San Fransisco-Amerika Serikat, pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri Republik Korea dan Jepang dalam Konferensi Keamanan Munich pada bulan Februari di Munich-Jerman, serta pertemuan *contactless* melalui telepon pada bulan November antara wakil Menteri Luar Negeri Republik Korea dan wakil Menteri Luar Negeri Jepang.

Selain itu, pemerintah Republik Korea dan Jepang masih mengadakan kegiatan-kegiatan pertukaran, terutama pertukaran anggota parlemen secara fisik; pada bulan Januari delegasi dari Persekutuan Anggota Parlemen Korea-Jepang/*Korean-Japan Parliamentarians Unions* berkunjung ke Jepang, lalu diikuti dengan kunjungan sekretaris umum Persekutuan Anggota Parlemen Jepang-Korea/ *Japan-Korean Parliamentarians Unions* ke Republik Korea pada bulan Oktober, serta kunjungan kembali perwakilan *Korean-Japan Parliamentarians Unions* ke Jepang pada bulan November dalam rangka mengikuti rapat gabungan dengan dewan gubernur *Japan-Korean Parliamentarians Unions*.

Di tahun 2021, terdapat perubahan pada kursi kepemimpinan Jepang—di mana pada tahun 2020 Jepang dipimpin oleh Yoshihide Suga sebagai Perdana Menteri sementara menggantikan Shinzo Abe, pada tahun 2021, yakni pada bulan Oktober, presiden partai Partai Demokratik Liberal (LDP) Fumio Kishida diangkat sebagai Perdana Menteri Jepang melalui sebuah pemilu yang melibatkan seluruh anggota LDP yang tergabung dalam parlemen Jepang dan beberapa anggota biasa LDP yang tersebar di seantero Jepang.

Dengan demikian, di tahun ini terdapat 2 fase komunikasi antara Presiden Republik Korea, Moon Jae-in, dengan 2 perdana menteri Jepang yang berbeda, yakni Yoshihide Suga dan Fumio Kishida. Selama kepemimpinan Yoshihide Suga di tahun tersebut, sebagai rangkaian diplomasi bilateral antara Republik Korea dan Jepang, terdapat 4 pertemuan dan komunikasi tingkat tinggi yang melibatkan menteri dan wakil menteri luar negeri kedua negara serta 7 pertemuan dan komunikasi yang

melibatkan representatif dari kementerian luar negeri kedua negara.

Sementara selama masa kepemimpinan Fumio Kishida yang mulai menjabat pada bulan Oktober, terjadi 1 komunikasi tingkat tinggi antara Republik Korea dan Jepang yang melibatkan Presiden Moon Jae-in dan Fumio Kishida dalam sebuah komunikasi jarak jauh melalui telepon, dan 1 pertemuan tingkat tinggi bilateral yang melibatkan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Korea dan Jepang dalam pertemuan *9th ROK-U.S.-Japan Vice Foreign Ministerial Meeting* (Reuters, 2021; Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea, 2021)

Sehingga, pada tahun 2021 sendiri terjadi satu kali percakapan antara pimpinan Republik Korea dan Jepang, tiga kali komunikasi dan pertemuan antara Menteri Luar Negeri Republik Korea dan Jepang, dua kali pertemuan antara Wakil Menteri Luar Negeri Republik Korea dan Jepang, dan tujuh kali pertemuan antara representatif spesial Republik Korea dan Jepang (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2022, hal. 16; Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea, 2021).

### **Interkoneksi Konflik Klaim Pulau Dokdo/Takeshima dengan Hubungan Diplomasi Bilateral Republik Korea dan Jepang**

Meskipun secara umum Republik Korea dan Jepang terlibat dalam sebuah hubungan diplomasi bilateral yang spesial, untuk permasalahan Dokdo/Takeshima sendiri, kedua negara terlibat dalam suatu situasi yang di mana masing-masing negara tidak ingin menyerahkan klaimnya atas pulau Dokdo/Takeshima. Karena itu, situasi ini ‘memaksa’ kedua negara untuk mengaplikasikan *multi-track diplomacy*, yang merupakan sebuah praktik diplomasi yang mengutamakan kerja sama dan normalisasi hubungan diplomasi negara-negara yang terlibat dan mengesampingkan berbagai isu yang dapat memperburuk hubungan diplomasi dari negara tersebut.

Meskipun kedua negara mengaplikasikan *multi-track diplomacy* dalam tindakan berdiplomasi mereka dan tetap mempertahankan hubungan diplomasi yang baik, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya sebuah efek yang disebabkan oleh konflik klaim pulau Dokdo/Takeshima terhadap hubungan diplomasi bilateral Republik Korea dan Jepang, layaknya bagaimana konflik klaim atas pulau Senkaku/Diaoyu mempengaruhi hubungan diplomasi bilateral antara Jepang dan Tiongkok (Nagy, 2013); yang dalam bagian setelah ini akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan masa kepemimpinan Moon Jae-in di Republik Korea dengan 3 perdana menteri Jepang di periode 2017-2021.

### **Era Park Geun-hye—Moon Jae-in—Shinzo Abe**

Seperti yang sudah ditunjukkan sebelumnya terkait perkembangan hubungan diplomasi bilateral Republik Korea dan Jepang, di tahun 2017, terutama sejak Mei 2017, baik itu pemerintah Republik Korea maupun pemerintahan Jepang secara rutin menggelar pertemuan bilateral untuk memperdalam hubungan diplomatis mereka. Namun di tahun ini juga, kondisi politik domestik Republik Korea yang di awal tahun 2017 sangat tidak stabil akibat skandal mantan presiden Republik Korea Park Geun-hye yang berujung kepada pemberhentiannya di bulan Maret 2017. Fenomena ini tentunya menghambat proses diplomasi antara Republik Korea dan Jepang, yang jika dirujuk dari *Diplomatic White Paper* Republik Korea di tahun 2017 mulai dari periode Januari 2017 hingga Maret 2017, hanya terjadi satu kali pertemuan bilateral antara Republik Korea dan Jepang, di mana pertemuan ini dilakukan dalam perhelatan G20 di Jerman pada saat itu (Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea, 2018).

Meskipun hal ini terlihat tidak berdampak kepada konflik klaim Dokdo/Takeshima yang masih berlanjut hingga saat itu, fenomena ini memberi efek lain terhadap bagaimana publik memberikan persepsi mereka terhadap konflik

klaim pulau Dokdo/Takeshima. Dalam jangka waktu Januari-Maret 2017, masyarakat Republik Korea memutuskan untuk turun ke jalan, dalam upaya mereka dalam memprotes kebijakan-kebijakan Park Geun-hye dan mendukung kebijakan pemerintahan pusat untuk memberhentikan beliau dari jabatannya sebagai presiden Republik Korea pada saat itu (Hankyoreh, 2017; NBC, 2017). Sementara di saat yang sama, namun dalam isu Republik Korea lain, yakni konflik klaim atas pulau Dokdo/Takeshima, juga terjadi banyak perkembangan yang bahkan mempengaruhi hubungan diplomatis mereka dengan lawannya dalam isu klaim teritorial ini, yakni Jepang, yakni: rencana pemerintah lokal Gyeonggi untuk membangun patung *comfort women* di pulau Dokdo yang berlanjut dengan protes keras dari pihak Jepang, penyelenggaraan acara *Takeshima Day* di Jepang yang tiap tahunnya menjadi objek protes dari pemerintahan Republik Korea, serta perubahan kurikulum Jepang dalam mendefinisikan status dari pulau Dokdo/Takeshima.

Mengingat Park Geun-hye yang saat itu sedang dalam masa pemeriksaan dan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang presiden, maka dalam-dalam hal tersebut yang berkenaan dengan pulau Dokdo/Takeshima, Kementerian Luar Negeri menjadi pihak yang mewakili keseluruhan pemerintah Republik Korea terkait konflik mereka dengan Jepang atas pulau Dokdo/Takeshima. Sementara itu di pihak Jepang dalam konflik klaim pulau Dokdo/Takeshima sendiri, mengingat karakteristik Shinzo Abe yang Profesor Terence definisikan sebagai “*a pretty hardcore nationalist*” yang menyebabkan Shinzo Abe tidak terlalu tertarik dalam berkompromi dengan Republik Korea kecuali dalam tekanan Amerika Serikat, Kementerian Luar Negeri merupakan pihak yang selalu mewakili intensi-intensi pemerintah pusat Jepang terkait pulau Dokdo/Takeshima.

Dengan demikian, terkait konflik klaim pulau Dokdo/Takeshima, Kementerian Luar Negeri dari masing-masing negara menjadi garis terdepan mereka dalam melindungi klaim

mereka atas pulau Dokdo/Takeshima. Hal ini semakin terlihat ketika kedua negara terlibat dalam perang argumen terkait kedaulatan pulau Dokdo/Takeshima di periode Januari-Maret 2017 di mana Park Geun-hye masih berstatus sebagai presiden Republik Korea.

Hal ini secara langsung berdampak kepada hubungan diplomasi kedua belah pihak negara, di mana setelah konferensi pers yang dilakukan oleh Republik Korea tersebut Republik Korea kemudian memanggil Duta Besar Kementerian Luar Negeri Jepang sebagai salah satu bentuk protes mereka. Kemudian pada tindakan Jepang yang pada bulan Februari 2017 menyelenggarakan acara *Takeshima Day* menambah citra buruk Jepang di mata pemerintah Republik Korea; yang saking buruknya hubungan diplomatis kedua negara ini (untuk permasalahan Dokdo/Takeshima), Republik Korea kembali melayangkan protes dalam konferensi pers mereka.

Protes ini intinya mengindikasikan bahwa meskipun *multi-track diplomacy* telah dijalankan oleh Republik Korea dan Jepang untuk memperbaiki hubungan diplomasi bilateral kedua negara tersebut, nampaknya Republik Korea masih belum bisa memisahkan aspek permasalahan historis mereka dari tindakan diplomasi Republik Korea. Namun di sisi Jepang, meskipun Republik Korea secara keras memprotes pengadaan acara *Takeshima Day*, terlihat Jepang tidak ikut memprotes Republik Korea ketika Korea mengadakan acara *Dokdo Day* di hari yang sama; yang meskipun hal ini dapat menunjukkan keteguhan Jepang dalam menjalankan *multi-track diplomacy* dan tidak ingin memperburuk hubungan diplomasi dengan Republik Korea karena tindakan yang dilakukan Jepang, tetapi dalam fenomena-fenomena lain yang melibatkan Jepang dalam konflik atas pulau Dokdo/Takeshima, Jepang tidak secara penuh merefleksikan hal ini dan turut memprotes tindakan yang dilakukan Republik Korea dalam upaya mereka mempertahankan klaim atas kedaulatan teritorial pulau Dokdo/Takeshima.

## **Kepemimpinan Moon Jae-in—Shinzo Abe: Dokdo Shrimp, Olimpiade Musim Dingin, dan Latihan Militer**

Setelah Park Geun-hye diberhentikan secara paksa dari kursi kepresidenan beliau di Republik Korea, Moon Jae-in naik ke kursi presidensi Republik Korea dan kembali melakukan *review* ulang terhadap berbagai kebijakan yang dibawa oleh Park Geun-hye di masa presidensi sebelumnya; terkecuali dengan kebijakan Republik Korea mengenai posisi dan klaim mereka atas pulau Dokdo/Takeshima yang dipersengketakan oleh Jepang. Bagaimana kebijakan terkait pulau Dokdo/Takeshima dapat bertahan di era Moon Jae-in merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dikatakan aneh, mengingat posisi serta klaim Republik Korea atas pulau Dokdo/Takeshima merupakan hal yang sudah dibawa oleh presiden-presiden Republik Korea sejak Perang Dunia 2 berakhir.

Hal lain yang membuat konflik teritorial pulau Dokdo/Takeshima di tahun 2017 ini semakin memuncak adalah ketika pada kunjungan presiden Amerika Serikat saat, Donald Trump, Republik Korea kemudian menawarkan sebuah menu makanan berbahan udang yang diambil dari pulau Dokdo dalam perjamuan mereka, yang dinamai sebagai “Dokdo Shrimp” (Kurabe, 2017).“

Pemerintah Jepang kemudian melayangkan sebuah pernyataan terkait tindakan Republik Korea ini, bahwa pemberian makanan tersebut merupakan hal yang dapat memberikan efek negatif terhadap hubungan Republik Korea dan Jepang yang semakin membaik, yang kemudian direspon oleh justifikasi Republik Korea terkait menu tersebut, menyatakan bahwa insiden ini bertujuan hanya untuk merefleksikan usaha dari Republik Korea untuk memastikan sebuah “perspektif yang seimbang” di Amerika Serikat terkait isu sejarah antara Republik Korea dan Jepang (McCurry, 2017).

Selain hal tersebut, terdapat 3 tindakan dari Republik Korea terhadap pulau

Dokdo/Takeshima yang makin memperburuk kondisi diplomasi di era kepemimpinan Moon Jae-in—Shinzo Abe; Februari 2018, Republik Korea bersama dengan Republik Demokratik Rakyat Korea memasukkan pulau Dokdo/Takeshima pada bendera unifikasi mereka yang dibuat dalam rangka untuk menyambut Olimpiade Musim Dingin 2018 yang diadakan di Pyongchang, Republik Korea (Steger, 2018). Bendera ini tidak hanya dimunculkan pada upacara pembukaan dari olimpiade ini saja, namun juga dikibarkan oleh pendukung tim Korea dalam sebuah pertandingan hoki es antara tim wanita Unifikasi Korea dengan tim wanita Swedia (AFP News, 2018).

Pengibaran ini direspon negatif oleh pemerintah Jepang, termasuk dari Yoshihide Suga, yang mengatakan bahwa pengibaran bendera unifikasi Korea dengan grafik pulau Dokdo/Takeshima di dalamnya adalah sesuatu yang tidak bisa diterima berdasarkan basis pemerintah Jepang terhadap kedaulatan teritorial pulau Dokdo/Takeshima. Hal ini kemudian dapat menjadi lebih buruk lagi ketika perdana menteri Shinzo Abe memiliki rencana untuk menghadiri upacara pembukaan Olimpiade Pyongchang. Namun untungnya, pengibaran bendera ini tidak terlalu menyebabkan Shinzo Abe untuk membatakan perhelatannya ke Republik Korea, mengingat unifikasi antara Republik Korea dan Republik Demokratik Rakyat Korea sendiri merupakan suatu kesempatan yang dapat menghilangkan ancaman nuklir Republik Demokratik Rakyat Korea ke Jepang. Sehingga, efek diplomatik yang disebabkan dari pengibaran bendera ini hanyalah protes langsung dari Yoshihide Suga dan protes khusus dari Kementerian Luar Negeri Jepang yang disampaikan melalui jalur diplomatik; salah satunya dengan melalui Kedutaan Besar Jepang di Republik Korea.

Fenomena serta respon dari Jepang atas tindakan Republik Korea juga terjadi pada April 2018. Dalam periode waktu tersebut, dua pemimpin Korea, Moon Jae-in dan Kim Jong-un memotong sebuah kue bergambar peta

unifikasi dua Korea yang turut memasukkan pulau Dokdo/Takeshima di dalamnya (Bullen, 2018). Karena hal tindakan tersebut merupakan sebuah upaya dalam mencapai perdamaian regional di Asia Timur, Jepang tidak bisa berbuat banyak selain melakukan protes.

Pada Juni 2018, Kementerian Pertahanan Republik Korea mengadakan latihan militer selama 2 hari, yang di mana latihan militer ini melibatkan 6 kapal dan 7 pesawat tempur, termasuk sebuah latihan pendaratan di pulau Dokdo/Takeshima yang dilakukan oleh anggota angkatan udara militer Republik Korea (Yeo, 2018). Lalu pada Desember 2018, Jepang kembali melakukan protes terhadap Republik Korea setelah sebuah kapal angkatan laut militer Republik Korea melakukan sebuah tindakan target terhadap kapal patroli yang dioperasikan oleh angkatan bersenjata Jepang - *Japan Self-Defense Forces (JSDF)*.

Tindakan yang di lakukan oleh Republik Korea ini bahkan dapat dikatakan melampaui dimensi hubungan diplomasi kedua negara. Disebut sebagai sebuah latihan militer yang bertujuan untuk “melindungi Republik Korea dari invasi kekuatan asing”, Jepang merespon secara negatif dengan mengirimkan protes keras melalui jalur diplomasi formal. Hal ini pun diikuti dengan Jepang yang turut mengerahkan alutsistanya ke kawasan *territorial water* pulau Dokdo/Takeshima dengan tujuan yang sama seperti Republik Korea.

Pada Desember 2018 sendiri, situasi protes yang biasanya dilakukan Jepang terhadap latihan militer yang dilaksanakan oleh Republik Korea di pulau Dokdo/Takeshima berkembang menjadi sebuah isu yang lebih besar daripada latihan-latihan militer sebelumnya; bagaimana tidak, pada latihan militer ini, kapal kelas *destroyer* milik Republik Korea, KDX-1, oleh Jepang dikatakan sempat mengunci targetnya kepada pesawat patroli udara Jepang, P-1, ketika pesawat tersebut memasuki perairan pulau Dokdo/Takeshima ketika sedang mencari kapal nelayan yang datang dari Republik Demokratik Rakyat Korea (Jeong, 2018).

Menurut Menteri Pertahanan Jepang Takeshi Iwaya, tindakan penguncian target ini dapat sangatlah berbahaya karena tindakan tersebut biasanya dilakukan sebuah alutsista militer sebelum melakukan tembakan. Tidak ingin dituduh karena ingin menembak pesawat patroli tersebut, Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korea, sebagai badan kementerian yang mengatur urusan kemiliteran di Republik Korea, memberi sebuah pernyataan bahwa tindakan penguncian target ini merupakan sebuah kesalahpahaman (Choi, 2018).

Meskipun permasalahan ini dapat memicu sebuah efek berantai dalam hubungan diplomasi bilateral antara Republik Korea dan Jepang, melihat fakta bahwa baik dari Republik Korea dan Jepang tidak mempermasalahkan hal ini melalui laporan tahunan dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan masing-masing negara serta ketiadaan tindakan serius dari Republik Korea maupun Jepang, dapat dikatakan bahwa hal ini tidak menimbulkan efek berantai seperti yang diperkirakan; di mana perkiraan ini didasarkan kepada bagaimana konflik atas klaim pulau Spratly yang melibatkan Tiongkok dan Filipina berujung memperburuknya hubungan kedua negara tersebut (Devary, 2015).

Di tahun 2019 sendiri, dapat dikatakan fenomena-fenomena diplomasi yang disebabkan oleh konflik Republik Korea dan Jepang dalam memperebutkan kedaulatan territorial pulau Dokdo/Takeshima sangat minim terjadi dan tidak memiliki variasi yang berbeda; di mana pada tahun 2019 sendiri memiliki ‘pola’ yang sama seperti tahun-tahun selain bagaimana Republik Korea memprotes keputusan Jepang yang kembali mengadakan Takeshima Day pada Bulan Februari di tahun tersebut dan protes keras Jepang yang dilakukan melalui jalur diplomatik terhadap latihan militer yang dilakukan oleh Republik Korea di kompleks pulau Dokdo/Takeshima pada Juni 2019 (Smith, 2019; Kyodo News, 2019).

Begitu pula dengan bagaimana Republik Korea dan Jepang mengangkat isu ini di ranah

diplomasi yang formal; di mana dari 13 pertemuan yang dilaksanakan di level tertinggi antara Republik Korea dan Jepang, pulau Dokdo/Takeshima sama sekali tidak diangkat dalam komunikasi kedua negara. Sehingga, layaknya di tahun sebelumnya, pengaruh pulau Dokdo/Takeshima terhadap hubungan diplomatik Republik Korea-Jepang hanya terjadi di level *ministerial* melalui aksi ‘lempar argumen’ yang dilakukan kedua negara.

Memasuki tahun baru, yakni tahun 2020, menandakan tahun ke-2 semenjak Jepang berganti sistem kalendernya, dari yang sebelumnya dinamakan Heisei kemudian berganti menjadi Reiwa. Di tahun ini, Shinzo Abe hanya menjabat selama 9 bulan sebelum turun secara sukarela karena alasan kesehatan.

Selama 9 bulan tersebut, presiden Republik Korea Moon Jae-in dan Shinzo Abe kembali berhadapan dengan berbagai isu terkait pulau Dokdo/Takeshima yang dapat menggoyahkan hubungan diplomasi bilateral mereka apabila isu tersebut tidak dapat dikontrol oleh masing-masing pemerintahan.

Layaknya tahun-tahun sebelumnya, konflik antara Republik Korea dan Jepang dimulai dengan penyampaian protes dari Kementerian Luar Negeri kedua negara tersebut terhadap klaim yang mereka buat atas kedaulatan teritorial pulau Dokdo/Takeshima di laporan tahunan Kementerian Luar Negeri Republik Korea dan Jepang, *Diplomatic White Paper* dan *Diplomatic Blue Book*. Meskipun hal ini sangat signifikan bagi kedua negara, tetapi melihat hal seperti ini sudah selalu terjadi dari tahun ke tahun membuat pengamat isu pulau Dokdo/Takeshima, salah satunya Profesor Terence, menganggap bahwa ini hanyalah sebuah “konflik yang dijadwalkan” yang tidak terlalu mempengaruhi hubungan diplomatik kedua negara.

### **Era Moon Jae-in—Yoshihide Suga: Konflik Peta Olimpiade Tokyo, Pertemuan G7**

Efek konflik klaim pulau Dokdo/Takeshima terhadap hubungan diplomasi bilateral

Republik Korea dan Jepang di dalam masa penjabatan Yoshihide Suga yang dimulai pada September 2020 hingga Oktober 2021 sendiri dapat dikatakan tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan dengan masa Shinzo Abe. Hal ini terbukti pada 6 bulan pertama masa jabatan Yoshihide Suga yang minim akan pengangkatan isu Dokdo/Takeshima. Hal yang serupa juga terjadi dalam isu-isu historis lain yang melibatkan Republik Korea seperti isu *comfort women* dan kerja paksa. Oleh Prof. Terence, hal ini dikatakan wajar mengingat citra dari Yoshihide Suga yang dilihat masyarakat dan tokoh politik Jepang sebagai seorang *caretaker*, bukan seseorang yang memiliki figur politik yang kuat. Hal ini menyebabkan Yoshihide Suga tidak akan menyebabkan sebuah perubahan besar terkait hubungan Jepang dengan Republik Korea.

Namun, sebuah perubahan besar dalam isu pulau Dokdo/Takeshima ini yang dapat menyebabkan konflik diplomatik antara Republik Korea dan Jepang; adalah ketika Republik Korea menyampaikan sebuah protes keras terhadap pemerintah Jepang, yang melalui Komite Penyelenggara Olimpiade Tokyo 2020 merilis sebuah peta yang memuat pulau Dokdo/Takeshima sebagai bagian dari kedaulatan wilayah Jepang di tahun 2021 (Shin, 2021). Tidak berhenti sampai protes ini saja, tindakan dari Jepang ini secara langsung mendapatkan reaksi dari Menteri Luar Negeri Republik Korea saat itu, Chung Eui-yong, yang beliau sendiri memberi peringatan keras terhadap keputusan Komite Penyelenggaraan Olimpiade Tokyo dalam merilis peta tersebut.

Insiden ini menyebabkan sebuah efek yang cukup serius terhadap hubungan diplomatik kedua negara, di mana Chung Eui-yong secara khusus meminta seluruh kedutaan besar Jepang yang berlokasi di Republik Korea untuk memodifikasi peta tersebut dengan menghilangkan pulau Dokdo/Takeshima sebagai bagian dari kedaulatan wilayah Jepang (Shin, 2021). Hal ini dapat dikatakan sangat besar, mengingat baik Jepang sendiri juga pernah Republik Korea untuk mengganti

benderanya dengan menghilangkan pulau Dokdo/Takeshima dari bendera tersebut ketika perhelatan Olimpiade Musim Dingin Pyongchang di tahun 2018. Dan terkait hal ini, mengingat Republik Korea pada saat itu menolak untuk menghilangkan grafik pulau Dokdo/Takeshima di benderanya, Jepang juga melakukan sebuah balasan dengan melakukan penolakan terhadap permintaan pemerintah Republik Korea tersebut. *Chief Cabinet Secretary* untuk Jepang pada saat itu, Kato Katsunobu, menyatakan bahwa pemerintah Jepang tidak akan menghapus pulau tersebut dari peta yang dipermasalahkan, yang merupakan permintaan dari Republik Korea, dan menyebutkan bahwa permintaan ini adalah sesuatu yang *unacceptable* dan kembali menekankan bahwa klaim Jepang atas kedaulatan teritorial pulau Dokdo/Takeshima tidak akan berubah (Shin, 2021). Sebagai perpanjangan dari pemerintah Jepang, kedutaan besar Jepang di Republik Korea pun mengadopsi pernyataan yang serupa dan menganggap permintaan Republik Korea sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima.

Sebagai reaksi berantai dari insiden ini, pemerintah Republik Korea kemudian memanggil Duta Besar Jepang untuk Republik Korea sebagai bentuk protes dari pemerintah Jepang, yang diikuti dengan kehebohan dari masyarakat Republik Korea yang meminta beberapa tokoh politik terkemuka Republik Korea untuk melakukan boikot terhadap Olimpiade Tokyo 2020. Selain itu, fenomena ini juga menimbulkan reaksi ‘kasar’ dari beberapa kalangan masyarakat Republik Korea, diantaranya adalah insiden pembakaran bendera Jepang di depan kedutaan besar Jepang di Republik Korea yang dilakukan oleh 3 orang mahasiswa Republik Korea (Cha & Umekawa, 2021).

Hal ini membuktikan bahwa meskipun Yoshihide Suga tidak ingin mengubah hubungan diplomatis Republik Korea dan Jepang yang dapat memburuk sewaktu-waktu, konflik kedua negara terkait pulau Dokdo/Takeshima merupakan sesuatu yang

tidak dapat dikontrol oleh masing-masing pemimpin negara yang terlibat.

Insiden lain terkait pulau Dokdo/Takeshima yang secara langsung mempengaruhi hubungan diplomatis kedua negara adalah efek berantai yang disebabkan oleh latihan rutin militer Republik Korea di pulau Dokdo/Takeshima pada akhir Juni—selang beberapa minggu setelah konflik kedua negara atas muatan pulau Dokdo/Takeshima di peta Jepang. Namun dibandingkan latihan-latihan sebelumnya, Republik Korea yang mengumumkan akan mengadakan latihan militer beberapa hari setelah rapat negara-negara G7 diperkirakan menjadi alasan Yoshihide Suga membatalkan pertemuannya dengan Moon Jae-in di perhelatan acara tersebut (McCurry, 2021; Johnson, 2021). Menurut agensi berita Yonhap, pertemuan antara kedua pemimpin tersebut dibatalkan secara sepahak oleh Yoshihide Suga setelah beliau memprotes penyelenggaraan latihan militer yang akan dilaksanakan oleh militer Republik Korea. Namun mengapa alasan ini menjadi salah satu perkiraan, adalah karena pernyataan dari Kato Katsunobu, yang masih menjadi *Chief Cabinet Secretary* untuk Yoshihide Suga, di mana beliau menyatakan bahwa pembatalan pertemuan antara pemimpin kedua negara ini disebabkan dengan adanya isu penjadwalan dari Yoshihide Suga, dan apa yang disampaikan perwakilan Kementerian Luar Negeri melalui agensi berita Yonhap merupakan sesuatu yang tidak memiliki basis fakta.

Menurut peneliti, hal ini sendiri juga menjadi sebuah perkiraan, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya, tidak ada data mengenai pembatalan pertemuan antara perwakilan dari pemerintah Republik Korea dan Jepang yang disebabkan latihan militer Republik Korea di pulau Dokdo/Takeshima meskipun ‘kesamaan jadwal’ ini sering kali terjadi; seperti yang terjadi pada 14 Juni 2018, di mana Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korea mengadakan latihan militer selama 2 hari, namun hal ini tidak menyebabkan pembatalan kunjungan Perdana Menteri Jepang, Taro Kono, ke Republik Korea

di tanggal 18 Juni 2018. Namun jika perkiraan ini merupakan sebuah fakta, maka ini pertama kalinya Perdana Menteri Jepang secara langsung mengungkapkan penolakannya terhadap latihan militer tersebut di level pertemuan tingkat tinggi.

### **Era Moon Jae-in—Fumio Kishida: Kunjungan Ilegal, Pertemuan Trilateral Jepang-Republik Korea-Amerika Serikat**

Dengan naiknya Fumio Kishida sebagai perdana menteri baru Jepang menggantikan Yoshihide Suga pada 4 Oktober 2021, hal ini membuka bagian baru terhadap konflik pulau Dokdo/Takeshima dan efek yang disebabkan konflik tersebut terhadap hubungan diplomasi bilateral Republik Korea dan Jepang.

Efek diplomatis pertama dari konflik klaim atas pulau Dokdo/Takeshima di masa jabatan Fumio Kishida muncul ketika Kepala Kepolisian Republik Korea, Kim Chang-yong, melakukan kunjungan ke pulau Dokdo/Takeshima. Dengan cepat Jepang memprotes kunjungan tersebut sebagai kunjungan ilegal terhadap teritorial yang menjadi bagian dari kedaulatan Jepang, dan membuat permintaan kepada pemerintah Republik Korea agar kunjungan ini segera dibatalkan (Asahi Shimbun, 2021). Yang menjadi perhatian dari tindakan ini adalah bagaimana kunjungan Kepala Kepolisian tersebut dilakukan sehari menjelang pertemuan trilateral antara Menteri Luar Negeri Jepang-Republik Korea-Amerika Serikat pada 18 November 2018.

Sebagai imbas dari kunjungan tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Takeo Mori yang menjadi perwakilan Jepang dalam pertemuan tersebut memutuskan untuk batal hadir. Bukan seperti perkiraan yang dimunculkan ketika Yoshihide Suga batal menemui Moon Jae-in pada acara G7, alasan dari pembatalan ini diklarifikasi oleh Deputi Sekretaris Negara Amerika Serikat, Wendy Sherman, yang berkata bahwa pembatalan ini disebabkan oleh adanya ‘perbedaan bilateral’ antara Republik Korea dan Jepang, yang hal ini

kemudian diklarifikasi lebih jauh oleh Wakil Menteri Luar Negeri Republik Korea, Choi Jong-kun, yang menyatakan ‘perbedaan bilateral’ yang sebelumnya disebut oleh Wendy Sherman merujuk kepada kunjungan Kepala Kepolisian Republik Korea ke pulau Dokdo.

Sebagai tindak lanjut dari pernyataan Deputi Sekretaris Negara Amerika Serikat dan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Korea, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno memberikan sebuah pernyataan, bahwa pemerintah Jepang memutuskan bahwa mengadakan konferensi bersama (dengan Republik Korea) merupakan sesuatu yang tidak pantas dilakukan di tengah konflik yang tengah terjadi terkait pulau Dokdo/Takeshima.

Terkait dengan latihan militer, Republik Korea kembali dengan latihan militernya di kawasan pulau Dokdo/Takeshima pada bulan Desember 2021—1 bulan pasca batalnya pertemuan antara Takeo Mori dan Choi Jong-kun. Hal ini kemudian ditampik dengan protes dari Jepang melalui jalur diplomasi formal (EurAsian, 2021).

### **KESIMPULAN**

Melalui indikator diplomasi bilateral dari Pannier (2020), terlihat bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2021, terjadi peningkatan intensitas dari hubungan diplomatis bilateral antara Republik Korea dan Jepang. Penurunan intensitas yang terjadi di tahun 2020-2021 sendiri bukan dikarenakan oleh memburuknya hubungan diplomatis kedua belah pihak negara—tetapi hal ini diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang membatasi komunikasi kedua pemimpin negara-negara ini secara langsung. Intensitas yang tinggi dari hubungan diplomatis yang bersifat bilateral ini justru berbanding terbalik dengan perkembangan konflik pulau Dokdo/Takeshima yang dari tahun ke tahun semakin memperburuk tanpa tanda-tanda resolusi yang jelas.

Nyatanya, dalam berurusan dengan konflik klaim Dokdo/Takeshima, pemerintah Republik Korea dan Jepang mengadopsi pendekatan

diplomasi *multi-track*. Pendekatan diplomasi ini merujuk kepada pendekatan yang dilakukan oleh kedua negara untuk menjalin hubungan diplomatik yang lebih baik dengan ‘meninggalkan’ isu-isu historis yang sedang dipersengketakan oleh kedua negara hingga saat ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- AFP News. (2018, Februari 5). *Japan protests unified Korea Olympic flag with disputed isles*. Retrieved from Yahoo News: [https://sg.news.yahoo.com/japan-protests-unified-korea-olympic-flag-disputed-isles-053025909.html?guccounter=1&guce\\_referrer=aHR0cHM6Ly9xei5jb20v&guce\\_referrer\\_sig=AQAAAJoyj5DeVHVZGek8Aeos7K7D33Lt4uP5mGpJs7wpZdJjK\\_m19wjGZh7jZftgCiysZThcnGrP7IPLF4zu0Ii8TDv](https://sg.news.yahoo.com/japan-protests-unified-korea-olympic-flag-disputed-isles-053025909.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9xei5jb20v&guce_referrer_sig=AQAAAJoyj5DeVHVZGek8Aeos7K7D33Lt4uP5mGpJs7wpZdJjK_m19wjGZh7jZftgCiysZThcnGrP7IPLF4zu0Ii8TDv)
- Asahi Shimbun. (2021, November 2021). *Japan protests South Korean police chief's visit to Takeshima*. Retrieved from The Asahi Shimbun: <https://www.asahi.com/ajw/articles/14483389>
- Bullen, J. (2018, April 27). *Korean leaders risk Japanese anger after displaying innocent looking summit cake that includes disputed islands in marzipan*. Retrieved from Mirror: <https://www.mirror.co.uk/news/world-news/korean-leaders-risk-japanese-anger-12439313>
- Cha, S., & Umekawa, T. (2021, Juni 2). *S.Korea appeals to IOC over disputed islands on Japan Olympics map*. Retrieved from Reuters: S.Korea appeals to IOC over disputed islands on Japan Olympics map
- Choi, K.-w. (2018, Desember 22). *Japan lashes out at S. Korean naval vessel target radar locking onto Japanese patrol plane in East Sea*. Retrieved from Hankyoreh: [https://english.hani.co.kr/arti/english\\_edition/n\\_e/international/875455.html](https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/n_e/international/875455.html)
- Chung, M. J. (2019). Analysis of the Territorial Issue regarding the Liancourt Rocks between Korea and Japan. *Korean Journal of International and Comparative Law*, 7, 1-66. doi:10.1163/22134484-12340116
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approach* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Devary, S. (2015, Agustus 17). *Diplomacy and the South China Sea*. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2015/08/diplomacy-and-the-south-china-sea/>
- Eckert, C. J., Lee, K.-B., Lew, Y. I., Robinson, M., & Wagner, E. W. (1990). *Korea Resistance Against Japanese Aggression*. Dalam C. J. Eckert, K.-B. Lee, Y. I. Lew, M. Robinson, & E. W. Wagner, *Korea, Old and New : A History*. Cambridge: Ilchokak.
- EurAsian. (2021, Desember 29). *Japan Lodges Formal Protest As South Korea Conducts Military Drills To Defend Disputed Islands*. Retrieved from EurAsian: <https://eurasiantimes.com/japan-lodges-formal-protest-as-south-korea-conducts-military-drills-over-disputed-islands/>
- Fifield, A. (2016, September 5). *North Korea fires 3 missiles as G-20 continues in China*. Retrieved from The Washington Post: [https://www.washingtonpost.com/world/north-korea-fires-missiles-as-g-20-continues-in-china/2016/09/05/267c9537-738a-47ef-9a9a-87b49449174a\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/north-korea-fires-missiles-as-g-20-continues-in-china/2016/09/05/267c9537-738a-47ef-9a9a-87b49449174a_story.html)
- Franco, T. (2018, November 18). *Two nations disputed these small islands for 300 years*. Diambil kembali dari National Geographic: <https://www.nationalgeographic.com/travel/article/history-dispute-photos-dodko-rocks-islands>
- Hankyoreh. (2017, Februari 6). *It's not spring yet - the 100th day of candlelight protests*. Retrieved from Hankyoreh: [http://english.hani.co.kr/arti/english\\_edition/e\\_editorial/781506.html](http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_editorial/781506.html)
- Ismail, A. b. (2017). The Dokdo/Takeshima Dispute: Responses and Approaches. *International Journal of East Asian Studies*, 6(1), 82-99.
- Jeong, J. (2018, Desember 27). *Is 'radar feud' sign of future military confrontation between South Korea and Japan?* Retrieved from DefenseNews: <https://www.defensenews.com/technology/2018/12/27/is-radar-feud-sign-of-future-military-confrontation-between-south-korea-and-japan/>

- <https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2018/12/26/is-radar-feud-sign-of-future-military-confrontation-between-south-korea-and-japan/>
- Johnson, J. (2021, Juni 15). *G7 a missed opportunity for Tokyo-Seoul ties as Suga and Moon fail to connect*. Retrieved from The Japan Times: <https://www.japantimes.co.jp/news/2021/06/15/national/japan-south-korea-suga-moon-ties/>
- Kim, H. N. (2009). The U.S. and the Territorial Dispute on Dokdo/Takeshima between Japan and Korea, 1945-1954. *International Journal of Korean Studies*, 13(2), 97-127.
- Kurabe, T. (2017, November 7). *S. Korea invites former "comfort woman" to state banquet with Trump*. Retrieved from Kyodo News: <https://english.kyodonews.net/news/2017/11/087671f3ab29-update3-s-korea-invites-former-comfort-woman-to-state-banquet-with-trump.html>
- Kyodo News. (2019, Februari 22). *Japan stresses its claim to South Korea-held islets on 'Takeshima Day' as bilateral tensions simmer*. Retrieved from The Japan Times: <https://www.japantimes.co.jp/news/2019/02/22/national/politics-diplomacy/japan-stresses-claim-south-korea-held-islets-takeshima-day-bilateral-tensions-simmer/>
- McCurry, J. (2017, November 10). *Japan anger over South Korea's shrimp surprise for Donald Trump*. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2017/nov/10/japan-anger-south-koreas-shrimp-surprise-menu-donald-trump-sex-slave>
- McCurry, J. (2021, Juni 15). *South Korea-Japan ties sour amid fresh military drills near disputed islands*. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2021/jun/15/south-korea-japan-military-drills-disputed-islands>
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2015, Juli 13). *Takeshima*. Dipetik September 16, 2021, dari Ministry of Foreign Affairs of Japan: [https://www.mofa.go.jp/a\\_o/na/takeshima/page1we\\_000014.html](https://www.mofa.go.jp/a_o/na/takeshima/page1we_000014.html)
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2018). *Diplomatic Blue Book 2018*. Tokyo: Ministry of Foreign Affairs of Japan.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2018, Maret 2017). *Japan-ROK Foreign Ministers' Meeting*. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs of Japan: [https://www.mofa.go.jp/a\\_o/na/kr/page3e\\_000832.html](https://www.mofa.go.jp/a_o/na/kr/page3e_000832.html)
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2019). *Diplomatic Blue Book 2019*. Tokyo: Ministry of Foreign Affairs, Japan.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2020). *Diplomatic Blue Book 2020*. Tokyo: Ministry of Foreign Affairs of Japan.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2021). *Diplomatic Blue Book 2021*. Tokyo: Ministry of Foreign Affairs of Japan.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2022). *2022 Diplomatic Blue Book*. Tokyo: Ministry of Foreign Affairs of Japan.
- Ministry of Foreign Affairs of Korea. (2017, Februari 22). *MOFA Spokesperson's Statement on "Dokdo Day" Event Held by Japan's Shimane Prefecture*. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs of Korea: [https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m\\_5676/view.do?seq=318161&page=1](https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=318161&page=1)
- Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea. (2018). *Diplomatic White Paper 2018*. Seoul: Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea.
- Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea. (2019). *Diplomatic White Paper 2019*. Seoul: Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea.
- Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea. (2020). *Diplomatic White Paper 2020*. Seoul: Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea.
- Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea. (2021). *Diplomatic White Paper*



- [http://english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI\\_EN\\_3\\_1\\_1.jsp?cid=264142](http://english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI_EN_3_1_1.jsp?cid=264142)
- VOA. (2016, Agustus 23). *Chinese, Japanese, South Korean Leaders Discuss Regional Tensions*. Retrieved from VOA News: <https://www.voanews.com/a/chinese-japanese-south-korean-leaders-discuss-regional-tensions/3476275.html>
- Wiegand, K. E. (2015). The South Korean-Japanese Security Relationship and the Dokdo/Takeshima Island Dispute. *The Pacific Review*, 28(3), 347-366. doi:10.1080/09512748.2015.1011209
- Yeo, J.-s. (2018, Juni 18). *S. Korea kicks off military drill to defend Dokdo*. Retrieved from The Korea Herald: <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20180618000725>

## BIOGRAFI

**Devin Alif Putra Pratama** merupakan Sarjana Hubungan Internasional alumni Universitas Padjadjaran. Devin memiliki ketertarikan (*area of interest*) terhadap isu dalam studi Hubungan Internasional di wilayah Asia-Pasifik.

**Teuku Rezasyah** pengajar pada Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran yang tertarik mengkaji mengenai diplomasi dan kebijakan luar negeri